

PERCEPAT PENGENDALIAN COVID-19

Shelter bagi Pasien OTG Dinilai Mendesak

YOGYA (KR) - Kebutuhan shelter yang diperuntukkan bagi korban Covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) dinilai cukup mendesak. Hal ini karena penambahan kasus baru selama sepekan kemarin relatif tinggi dan hampir semuanya merupakan OTG.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Ali Fahmi, berharap gedung-gedung milik Pemkot yang tidak atau belum terpakai bisa menjadi alternatif dijadikan shelter. Dengan catatan harus dilengkapi fasilitas memadai.

"Dalam peraturan Menteri Kesehatan, bagi yang OTG harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Padahal ada sebagian pasien OTG yang di rumahnya terdapat balita dan lansia. Itu bisa menjadikan risiko penularan jika isolasi dilakukan di rumah. Makanya shelter sudah sangat mendesak," desaknya, Minggu (13/9).

Diakuinya, untuk membangun penampungan baru sudah tidak memungkinkan. Begitu pula meminjam gedung milik pusat yang saat

ini sudah kembali difungsikan sesuai peruntukan. Pemilik hotel yang sebelumnya mempersilakan, kini pun fokus melayani tamu yang menginap.

Kendati demikian, Pemkot harus merumuskan berbagai alternatif untuk mempercepat pemenuhan shelter. Sembari shelter disiapkan, pasien OTG yang menjalani isolasi mandiri juga perlu diperhatikan semua kebutuhannya agar lebih optimal selama di rumah. "Keberadaan shelter bisa mempercepat pengendalian penularan Covid-19. Perlu juga disiapkan rumah sakit lapangan jika nantinya tidak dapat tertampung di shelter," tandasnya.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, sebelumnya mengaku su-

dah gencar mengajukan izin ke pemerintah pusat untuk meminjam gedungnya yang ada di Yogya. Salah satunya bangunan baru yang sudah terbangun lengkap dengan perabotnya dan belum dimanfaatkan. Total ada 24 ruang dengan 48 kamar tidur yang sangat representatif.

"Lokasi gedung itu juga jauh dari permukiman penduduk sehingga sangat layak. Tapi kami masih menunggu persetujuannya. Selain itu ada delapan kamar di RS Pratama yang bisa digunakan untuk shelter," jelasnya.

Sembari menunggu kesiapan shelter, Heroe mengaku, wilayah yang terdapat pasien OTG akan dibangun posko bersama. Posko itu memanfaatkan gedung publik seperti Balai RW yang bisa digunakan gugus tugas wilayah dalam memantau warganya yang menjalani isolasi mandiri. Salah satu posko sudah terbangun ialah di Pandeyan karena ada belasan anggota keluarga yang isolasi mandiri dalam satu rumah. **(Dhi)-f**

DISIPLIN DAN KERJA KERAS

Kata Kunci Meraih Sukses



Dr H Tejo Katon

hatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) DIY dan masih banyak lagi lainnya. Di luar jam aktif kantor pada hari Sabtu, ia masih sempat menjadi dosen luar biasa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suami dr Hj Rofiana Komalasari MARS ini tergolong pekerja keras. Sejak duduk di bangku SD, Tejo menjadi pemungut buah kelapa. Saat SMP dan SMA, ia sudah akrab dengan ling-

kungan pasar, angkut barang dagangan karena membantu orangtuanya yang membuka toko kelontong. Saat kuliah ia juga mengisi waktu menjadi tutor bimbingan belajar untuk menutupi kebutuhan biaya kuliah yang berhasil dirampungkan semua.

Saat mendaftar di Kementerian Agama DIY, Tejo Katon bukan sebagai dokter melainkan sarjana statistik. Ketika ketahuan bahwa berpendidikan kedokteran, maka dirinya diminta menjadi dokter di Unit Kesehatan Kanwil Kemenag DIY pada 2010 tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai pengelola data.

Jebolan Fakultas Kedokteran UMY ini memang sejak muda sangat aktif di organisasi. Namun begitu ia mengaku tidak sulit membagi waktu. Disiplin menjadi kata kuncinya. **(Feb)-f**

HSPG Adakan 'Parents Meeting' Virtual



KR-Istimewa

Direktur HSPG Kusnanto menyampaikan paparan.

YOGYA (KR) - Home Schooling Primagama (HSPG) Yogyakarta, mengadakan kegiatan 'Parents Meeting' secara virtual, Jumat (11/9). Acara itu diikuti semua orangtua siswa jenjang SD hingga SMA yang dibagi dalam dua sesi. Ada beberapa hal yang dibahas, paling utama mengevaluasi pembelajaran jarak jauh pada tri wulan pertama.

Manajer Akademik HSPG, Leo Agung Noviar Kidung Adi SPd mengatakan, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah selama pandemi, peran orangtua sangat penting, karena merekalah yang mendampingi anak selama belajar di rumah. Oleh karena itu, HSPG perlu melaporkan secara komprehensif evaluasi pembelajaran ke orangtua meliputi kehadiran/partisipasi siswa, fungsi kontrol yang dilakukan orangtua, lembaga maupun guru serta kendala yang dihadapi salah satunya masalah koneksi internet.

"Dalam parents meeting itu, kami sampaikan evaluasi, rekomendasi kepada orangtua sekaligus berdiskusi dan menerima masukan dari para orangtua. Di harapan terbangun satu persepsi yang sama antara guru, lembaga dan orangtua, sehingga proses pembelajaran selanjutnya lebih baik dan optimal," terang Kidung kepada KR di sela kegiatan. Tak ketinggalan diberikan tips dan trik dari tim psikologi HSPG kepada orangtua bagaimana memotivasi siswa dan menghilangkan kejenuhan anak selama belajar dari rumah. **(Dev)-f**

KONFERDA PWI DIY 2020

Teguhkan PWI Sebagai Organisasi Profesional

YOGYA (KR) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY akan menggelar hajatan akbar Konferensi Daerah/Provinsi (Konferda) sekaligus suksesi kepemimpinan. Yakni memilih Ketua PWI DIY, formatur dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI DIY periode 2020-2025 serta menentukan arah program lima tahun ke depan.

Ketua Panitia Konferda PWI DIY Hudono mengatakan, konferda dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama atau prakonferda berupa pembahasan Tatib Konferda (zoom meeting) pada 24 September. Tahap kedua LPJ pengurus PWI DIY 2015-2020 (zoom meeting) pada 25 September dan tahap ketiga pemilihan langsung (off line) Ketua PWI DIY, formatur dan Ketua DKD pada Sabtu, 26 September 2020 pukul 09.00-12.00 di Gedung PWI DIY Jalan Gambiran 45 Yogya. "Ketiga tahapan tersebut dapat diikuti anggota muda maupun luar biasa, namun tidak punya hak suara," terang Hudono kepada KR, Sabtu (13/9).

Menurut Hudono, sebagai organisasi profesional di bidang kewartawanan, PWI DIY selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Kalaupun keputusan harus diambil melalui pemungutan suara dalam pemilihan Ketua PWI, formatur dan Ketua DKD, pemilihan dilakukan secara tertulis, bebas dan rahasia. "Penggunaan hak suara anggota akan sangat mempengaruhi masa depan PWI DIY sebagai organisasi yang independen, tangguh, dan bermartabat," katanya.

Panitia Konferda PWI DIY 2020 mengharapkan partisipasi seluruh anggota PWI

DIY. Sekretaris Panitia Konferda PWI DIY Swasto Dayanto menambahkan, sebagaimana diatur dalam PDPRT PWI DIY tahun 2019, yang mempunyai hak pilih dan dipilih (dengan persyaratan tambahan) adalah anggota biasa dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA) yang masih berlaku.

"Panitia mengharapkan bagi anggota PWI yang KTA-nya telah habis masa berlakunya, segera mengurus perpanjangan di Sekretariat PWI DIY Jalan Gambiran 45 Yogya atau perwakilan di media masing-masing paling lambat 19 September 2020 pada jam kerja (berkas terakhir masuk)," ujar Swasto.

Persyaratan perpanjangan KTA yang diperlukan yakni pasfoto 3x4x6 berwarna sebanyak 4 lembar. Mengisi formulir yang telah disediakan di sekretariat PWI atau perwakilan media masing-masing dan fotokopi KTA lama. Rekomendasi media, tanda tangan Pemred dan cap media. Fotokopi UKW (bagi KTA yang sudah gugur atau tidak berlaku lebih dari satu tahun).

Sedangkan untuk calon yang dapat dipilih menjadi Ketua PWI DIY (sesuai PDPRT PWI) adalah sudah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya tiga tahun. Pernah menjadi pengurus PWI pusat atau PWI provinsi atau PWI kabupaten/kota. Bersertifikat wartawan utama.

Sementara untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi, harus memiliki jenjang kompetensi wartawan utama. Telah menjadi anggota biasa PWI sekurang-kurangnya lima tahun. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. **(Dev)-f**

BANTUAN SOSIAL TUNAI KEMENSOS

Realisasi Tahap Dua Semakin Baik

YOGYA (KR) - Realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada tahap kedua ini dinilai semakin baik. Pada tahap pertama lalu realisasinya hanya 95 persen sedangkan tahap kedua ini sudah mencapai 98 persen.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat, menilai realisasi yang semakin baik tersebut salah satunya karena validasi data yang lebih ketat. "Harapan kami bisa 100 persen karena data penerima BST tahap kedua ini sudah lebih valid," jelasnya, Minggu (13/9).

Total ada 5.833 warga miskin di Kota Yogyakarta yang masuk sebagai penerima BST Kemensos tahap kedua. Dibanding tahap pertama, ada pengurangan sekitar 500 warga karena dinilai tidak layak, meninggal dunia serta pindah kependudukan.

Agus mengatakan, bagi penerima yang belum mengambil BST masih diberi kesempatan di kantor pos setempat. Batas waktu pengambilan ditunggu hingga pertengahan bulan ini. "Kalau sampai batas waktu masih belum diambil, maka datanya akan dikunci dan otomatis kembali masuk ke negara," tandasnya.

Selain penerima yang berkurang, besaran bantuan yang digulirkan juga lebih sedikit dibanding BST tahap pertama. Pada tahap pertama besarnya mencapai Rp 600.000 per bulan, sedangkan tahap kedua ini Rp 300.000 per bulan selama dua bulan yakni Juli dan Agustus. Distribusi bantuan itu juga sudah dilakukan pada 23-24 Agustus 2020 lalu.

Agus berharap, BST yang diberikan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terutama untuk kecukupan pangan. Pembelanjaannya juga diharapkan di warung-warung kecil sekitar rumahnya. Sehingga terjadi perputaran ekonomi di wilayah meski skala kecil. "Kalau kebutuhan pangan sudah terukupi, harapannya masyarakat bisa produktif di masa pandemi Covid-19 saat ini," imbuhnya.

Terkait BST yang dibiayai menggunakan APBD Kota Yogyakarta, Pemkot sampai saat ini juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. **(Dhi)-f**



PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021-2024

Sehubungan dengan akan berakhirnya keanggotaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti Tahun 2018 - 2021, Tim Seleksi membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk menjadi anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti Tahun 2021 - 2024, dengan persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak pendaftaran.
3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan ijazah asli.
4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat Dokter.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6. Daftar Riwayat Hidup.
7. Surat pernyataan bermeterai sanggup bekerja penuh waktu.
8. Surat pernyataan tidak berstatus ASN, Anggota TNI/Polri, tidak menjadi pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai.
9. Surat Pernyataan bermeterai tidak sedang menjadi pengurus/komisioner, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga-lembaga sejenis lainnya.
10. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Tim Seleksi.
11. Membuat karya tulis dengan tema "Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Mengawal Pelayanan Publik dan Etika Bisnis di Era Adaptasi Kebiasaan Baru" (File Word, Font Time New Roman (12), Spasi 1.5, Minimal 3 halaman maksimal 5 halaman) yang merupakan karya tulis asli (bukan plagiasi).
12. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna (format jpg).

Catatan:

- ✓ Persyaratan administrasi nomor 1,3,4,5, dan 6 di scan dalam bentuk file PDF.
- ✓ Formulir nomor 7, 8, 9, 10 disediakan Tim Seleksi dan dapat diunduh melalui website Biro Hukum Setda DIY (<http://birohukum.jogjapro.go.id/>).
- ✓ Formulir nomor 7, 8, 9, 10 diisi, ditempel materai pada tempat yang disediakan dan di scan dalam bentuk PDF.
- ✓ Semua persyaratan administrasi tersebut diatas dikirim dalam satu folder yang diberi judul nama pendaftar ke Tim Seleksi melalui email pemberkasan.seleksi.lodiy@gmail.com
- ✓ Pendaftaran dan pemberkasan dibuka pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan 29 September 2020. Untuk kemudahan dalam pemberkasan calon peserta seleksi diminta untuk mengirim email berkas syarat administrasi ke Tim Seleksi pada hari tersebut dan jam kerja (pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB).
- ✓ Email pengiriman syarat administrasi diterima oleh Tim Seleksi paling lambat tanggal 29 September 2020 pada pukul 14.00 WIB.
- ✓ Narahubung (Siwi: 085878206083 dan Dewi: 081804163650).

Yogyakarta, 7 September 2020

a.n. Ketua Tim Seleksi

Sekretaris,

DEWO ISNU BROTO I.S., S.H.



DPRD KOTA YOGYAKARTA SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

LEGISLATIF BERPERAN STRATEGIS

Pemerataan Pembangunan Sebagai Kunci Mewujudkan Kesejahteraan

YOGYA (KR) - Luas wilayah Kota Yogyakarta yang tidak lebih dari 32,5 kilometer persegi, termasuk kota kecil dengan 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Penataan pembangunan di Kota Yogya juga harus memperhatikan beberapa ikon kota seperti pariwisata, pendidikan, kuliner serta beragam destinasi. Peran aktif lembaga legislatif pun sangat diperlukan untuk menata kota, apalagi Yogya tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dieksplorasi.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo ST, mengungkapkan peran legislatif diperlukan agar pembangunan Kota Yogya secara umum dapat terlaksana dengan baik. "Seperti halnya dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan yang ditujukan untuk kesejahteraan penduduk Kota Yogya," ungkapnya.

Selain itu diharapkan pembangunan tersebut tidak mengesampingkan aspek sejarah dan keunikan identitas Kota Yogya yang dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan, pematangan serta sinkronisasi di dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini karena pemerataan pembangunan meru-



KR-Istimewa

Cahyo Wibowo ST

pakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Cahyo Wibowo menambahkan, menata pembangunan Kota Yogya harus diawali dengan pemerataan pembangunan. Sehingga jangan sampai penataan kota hanya terpusat di daerah utara dan timur, tetapi juga mulai masuk penataan daerah barat dan selatan. "Termasuk dalam hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan. Di mana melalui sistem zonasi kita dapat

melihat ketidakmerataan pembangunan dengan adanya wilayah kecamatan yang tidak memiliki SMP negeri, sedang di sisi lain ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu SMP negeri dalam satu wilayah," urainya.

Dengan demikian, anggota legislatif sebagai perwakilan masyarakat dan dipilih oleh masyarakat harus dapat mengambil peran dalam mendorong pemerataan pembangunan. Di antaranya adalah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan mensinkronkan program dan kebijakan pemerintah kota dengan keinginan masyarakat secara luas.

Apalagi lembaga dewan dalam berperan memiliki posisi yang strategis. Terutama dalam mencermati perencanaan, mengawasi pelaksanaan hingga menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dari konstituentnya. "Di sinilah peran sentral legislatif untuk bersama-sama mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta menata Kota Yogya. Sehingga Kota Yogya bisa semakin baik dan menjadi tujuan utama wisata yang akan mengangkat perekonomian dan berlimas positif pada masyarakat lokal," urainya. **(Dhi)-f**